



# POLITICOS:

## Jurnal Politik dan Pemerintahan

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/index>

## Studi Komparatif Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan PPP dan PAN di Kota Tangerang

Zidan Hizbullah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: 6670180116@untirta.ac.id

**How to Cite:** Hizbullah, Z. (2023). Studi Komparatif Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan PPP dan PAN di Kota Tangerang. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 3 (2): 76-89. Doi: <https://doi.org/10.22225/politicos.3.2.2023.76-89>

### Abstract

*This research aims to examine the political recruitment process carried out by two Islamic Nationalist Parties in recruiting female Bacaleg in the 2019 Legislative Election in Tangerang City. The discussion regarding women's participation in political contestation is still an interesting issue because the political world is believed to be a realm that is thick with patriarchal culture, so it often causes unfair treatment received by women when they try to attend through political recruitment activities organized by political parties. Hazan and Rahat's theory of political party organizing related to political recruitment was used to dissect the field findings. This study uses qualitative research methods descriptive case study approach with comparative structure. The result of this study is that PPP and PAN in recruiting female candidates apply the same pattern, which tends to lead to exclusivity and its implementation is in accordance with Article 29 paragraph (2) of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties, because these two parties carry out political recruitment openly. The reason for the lack of women occupying numbers 1 and 2 is due to the lack of value weight from women which affects the process of assigning sequence numbers for candidates.*

**Keywords:** political parties; political recruitment; PPP; PAN; women.

### Abstrak

Riset ini bertujuan untuk mengkaji proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh dua Partai Islam Nasionalis dalam merekrut Bacaleg perempuan pada Pileg 2019 di Kota Tangerang. Perbincangan terkait partisipasi perempuan dalam kontestasi politik masih menjadi isu menarik karena dunia politik dipercayai sebagai ranah yang kental dengan budaya patriarki, sehingga kerap menimbulkan perlakuan tidak adil yang diterima oleh kaum perempuan manakala mereka berusaha untuk hadir melalui kegiatan rekrutmen politik yang diselenggarakan oleh partai politik. Teori pengorganisasian partai politik terkait rekrutmen politik milik Hazan dan Rahat digunakan untuk membedah temuan lapangan. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan studi kasus deskriptif dengan struktur komparatif. Hasil penelitian ini adalah PPP dan PAN dalam melakukan rekrutmen Bacaleg perempuan menerapkan pola yang sama, yakni cenderung mengarah ke eksklusif dan pelaksanaannya telah sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011

tentang Partai Politik, karena kedua partai ini melaksanakan rekrutmen politik secara terbuka. Alasan sedikitnya perempuan menduduki nomor urut 1 dan 2 disebabkan oleh minimnya bobot nilai dari perempuan yang memengaruhi proses penetapan nomor urut bagi Bacaleg.

**Kata kunci:** rekrutmen politik; partai politik; perempuan; PPP; PAN.

## I. PENDAHULUAN

Upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam dunia politik terus digalakkan sebagai bentuk dukungan untuk menciptakan kesetaraan gender (Agustyati, 2020; Aufar et al., 2022; Ikmal, 2019; Sutrisno, 2016; Wulandari, 2020). Selain itu, upaya diadakannya perempuan pada ranah politik pun bertujuan untuk mematahkan konstruksi sosial yang bersifat negatif mengenai perempuan dan sekaligus sebagai bentuk perwujudan bahwasanya kaum perempuan pun berhak untuk tampil di ruang public (Aufar et al., 2022; Firmansyah & Faradhila, 2022; Mayrudin et al., 2022; Priandi & Roisah, 2019; Sari, 2020). Hal ini merupakan salah satu bentuk pengimplementasian dari kebijakan aksi afirmasi (*affirmative action*) guna memberikan peluang yang sama antar kelompok dalam suatu bidang yang sama, misalnya dengan menyerukan syarat minimum sebanyak 30 persen dalam kepengurusan partai politik maupun untuk mengikuti Pemilu (Arka, 2021; Hadi, 2014; Kambuaya, 2015). Dalam mewujudkannya, Lembaga legislatif telah mengesahkan berbagai UU guna meningkatkan keterwakilan perempuan di dunia politik (Komisi Pemilihan Umum, 2018; Pemerintah Pusat, 2008, 2017). Namun beberapa peneliti berpendapat jika berbagai UU itu masih jauh dari yang diharapkan

Permendagri No. 8 Tahun 2019 (Ahmadi, 2019; Raharja, 2019; Sofian & Nahdiah, 2022), karena jika melihat jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI setiap periodenya saja masih bersifat fluktuatif dan tidak pernah mencapai jumlah sebanyak 30 persen seperti yang diharapkan (Ekawati, 2015; Umagapi, 2020).

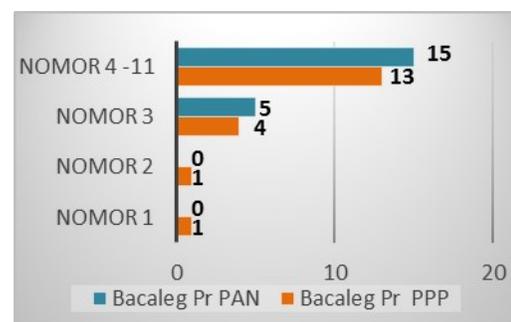
Jumlah anggota perempuan yang fluktuatif pun terjadi di Kota Tangerang, berdasarkan data (BPS Kota Tangerang, 2017, 2022), jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tangerang tidak pernah mencapai 30 persen. Dengan demikian, partai politik perlu berupaya lebih untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yang dapat ditunjukkan melalui agenda rekrutmen politik. Minimnya kehadiran perempuan di dunia politik tidak serta merta menjadi tanggungjawab parpol saja, karena realitanya menurut (Ballington & Matland, 2004) berpendapat jika kaum perempuan harus menghadapi sejumlah tantangan yang lebih banyak daripada kaum laki-laki, misalnya dengan adanya budaya patriarki yang masih langgeng di lingkungan Masyarakat (Ballington & Matland, 2004; Sakina & A., 2017; Umagapi, 2020). Apalagi dengan budaya masyarakat Indonesia yang sarat dengan pengaruh nilai keislaman sebagai agama mayoritas, yang menjadikan peran dan kedudukan dari kaum perempuan yang dipengaruhi oleh budaya patriarki pun secara tidak langsung

terbentuk dengan ajaran islam (Adiwilaga, 2017; Indriyany et al., 2020; Kumari, 2016; Sweinstani, 2019).

PPP dan PAN selaku partai Islam nasionalis telah mengamanatkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di ranah politik (Amanda, 2022; Baidoi, 2008; Fransiska, 2003; Kiswondari, 2022; Mansur & Hermawan, 2018; Rochim, 2019). Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kader perempuan yang diikutsertakan pada Pileg di Kota Tangerang pada tahun 2019 lalu. Bagi lima dapil di Kota Tangerang, PPP berhasil mengikutsertakan kadernya sebanyak 19 orang atau 39,58%, atau sebesar 39,58 persen, sementara PAN sebanyak 20 orang atau berjumlah 42,55 persen, yang mana jumlahnya lebih banyak daripada Partai Islam nasionalis lainnya (KPU Kota Tangerang, 2019). Namun penulis menemukan hal yang menarik, yakni nomor urut 1 dan 2 di kelima Dapil Kota Tangerang mayoritas diduduki oleh kader laki-laki, sedangkan kader perempuan dari PPP dan PAN mayoritas menduduki nomor urut 3 hingga ke bawah. Namun, berdasarkan penelitian (Ahmadi, 2019; Jovani, 2015; Ramadhany & Rahmawati, 2020; Umagapi, 2020) nomor urut 1 dan 2 dianggap mampu memberikan peluang besar terpilihnya Caleg dalam kontestasi politik.

Pada diagram di atas, meskipun terdapat kader perempuan yang menduduki nomor urut 1 atau 2, tetapi jumlahnya hanya sedikit, sementara sisanya menduduki nomor urut 3 hingga ke bawah. Fenomena itu menyiratkan bahwasanya

kehadiran perempuan dirasa hanya dijadikan “pemanis” saja untuk memenuhi persyaratan mengikuti Pileg yang dibebankan bagi partai politik (Andari & Adnan, 2018; Mafatihul, 2015; Mayrudin et al., 2022; Silalahi et al., 2019; Umagapi, 2020). Lebih jauh lagi, (Labolo, 2015) menilai jika agenda rekrutmen politik yang dilakukan oleh parpol di Indonesia saat ini dilakukan secara instan dan tak jarang pula dilakukan secara tertutup, serta dalam proses penentuan nomor urut pun parpol lebih memprioritaskan segelintir individu yang memiliki modal sosial, semisal tokoh partai yang memiliki popularitas tinggi (Halim, 2019), tokoh partai yang telah aktif sejak lama dalam partai politik tersebut (Himawan et al., 2015), dan tokoh incumbent dari partai (Ahmadi, 2019). Berangkat dari berbagai persoalan yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini akan melihat perbedaan atas bagaimana pola partai politik yang memiliki asas keislaman dan nasionalis yaitu PPP dan PAN dalam melakukan kegiatan rekrutmen bagi Bacaleg perempuan, akankah bersifat sentralisasi atau desentralisasi.



Gambar 1. Nomor Urut Caleg Perempuan PPP dan PAN

Sumber: (KPU Kota Tangerang, 2018)

## **II.METODE**

Dalam menyusun penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat komparatif. Penggunaan struktur komparatif, menurut (Yin, 2018) digunakan untuk membandingkan terhadap dua kasus atau lebih, yang mana dalam tulisan ini ialah untuk membandingkan pola rekrutmen politik berbasis keadilan gender terhadap dua Partai Politik yang menggunakan ideologi yang sama, yakni PPP dan PAN. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik wawancara yang dilakukan secara tidak struktur kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga penulis menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang didasari atas pertimbangan tertentu guna menghasilkan data yang relevan menyangkut penelitian, seperti kepada 8 orang informan yang terlibat dalam proses rekrutmen politik dari kedua partai politik. Selain itu, penulis pun menggunakan teknik dokumentasi untuk menunjang penelitian yang berasal dari dokumen kedua partai, publikasi KPU dan BPS Kota Tangerang, hingga artikel dan jurnal penelitian yang telah terpublikasi di internet.

## **III.HASIL DAN PEMBAHASAN**

PPP dan PAN merupakan partai Islam nasionalis yang telah berkecimpung cukup lama di dunia perpolitikan Kota Tangerang. PPP telah hadir di Kota Tangerang sejak tahun 1991, pada masa itu PPP bertarung

dengan dua partai lainnya yang membawa paham ideologi masing-masing, PPP dengan ideologi Islam, PDI dengan paham nasionalis sekunder, dan Partai Golkar yang membawa paham ideologi Pancasila. Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh (DPC PPP Kota Tangerang, 2023), PPP telah mengikuti 6 kali Pileg di Kota Tangerang.

Sementara PAN telah meramaikan perpolitikan di Kota Tangerang sejak terbentuknya partai itu, yaitu pada tahun 1999 (Wawancara dengan Iwan Cahyadi selaku Wakil Ketua DPD Periode 2016-2021 di Sekretariat DPD PAN Kota Tangerang, 13 Januari 2023). Pada tahun yang sama, PAN langsung menyiapkan para kadernya untuk diikutsertakan pada Pileg pertamanya di tahun 1999. Dari penyampaian Iwan pun, partai ini telah mengikuti Pemilu sebanyak 5 kali. Untuk menjaga eksistensi dari kedua partai tersebut, PPP dan PAN terus melakukan rekrutmen politik dan mempersiapkan kader pada kontestasi politik, yang mana pada penelitian ini penulis menggunakan teori pengorganisasian partai politik terkait rekrutmen politik dari pemikiran Hazan dan Rahat dalam (Katz & Crotty, 2006), seperti berikut.

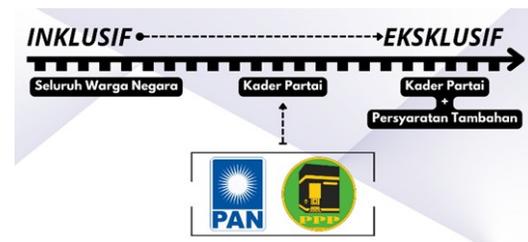
### ***Pihak Yang Dapat Dinominasikan***

Berdasarkan keterangan dari para informan yang berasal dari PPP dan PAN, mereka mengatakan jika masing-masing partai dalam melakukan rekrutmen politik memanfaatkan media cetak berupa spanduk dan pamflet yang disebar ke seluruh daerah di Kota Tangerang guna menarik

para kandidat, baik bagi laki-laki dan perempuan yang kemudian pendaftaran akan diarahkan kepada Sekretariat masing-masing partai politik. Meskipun ditemukan kesamaan dari kedua partai, tetapi ditemukan perbedaan dalam mengajukan persyaratan kepada para Bacaleg. Jika di PPP, Rahmi selaku perempuan yang gagal untuk maju menjadi Caleg tahun 2019 lalu menuturkan bahwa persyaratan yang diajukan oleh PPP adalah diwajibkan beragama Islam dan bisa membaca Al-Qur'an, namun beliau mengatakan jika dirinya gagal untuk maju hanya dikarenakan usia yang belum memenuhi syarat (Wawancara dengan Rahmi Rizfa A di Solaria Duta Garden Kota Tangerang, 04 Desember 2023).

Sedangkan di PAN, Fauzan mengatakan jika masing-masing Bacaleg wajib untuk melampirkan sertifikat Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) (Wawancara dengan Fauzan Manafi Albar di Kediaman Fauzan, 10 Desember 2022). Walaupun memang pada realitanya menurut Fiorita persyaratan tersebut tidak diwajibkan ketika melakukan pendaftaran (Wawancara dengan Fiorita di Menjulung Kedai Kopi Eps. 2, 16 Januari 2023). Dari penuturan para informan tersebut, dibuktikan bahwa pihak PPP dan PAN tidak mengajukan persyaratan yang sulit bagi masyarakat, apalagi bagi kaum perempuan untuk dipenuhi. Alasannya, persyaratan yang diajukan oleh kedua partai hanya mengacu kepada PKPU yang berlaku, walaupun memang PPP dan PAN memberikan persyaratan tersendiri bagi para Bacalegnya.

Sementara itu, kedua partai pun melakukan metode lainnya. Semisal pada partai berlogo Ka'bah, partai ini mendatangi langsung kepada para perempuan yang memiliki pengaruh besar di lingkungan masyarakat. Menurut Yati, DPC PPP sebagian besar lebih mencari kandidat yang berasal dari tokoh agama, seperti Ustaz dan Ustazah di Majelis Ta'lim atau mereka yang berasal dari organisasi Islam, semisal NU dan Muhammadiyah. Bahkan, partai ini pun membuat surat undangan kepada beberapa tokoh, baik laki-laki atau pun perempuan untuk mendaftarkan diri mereka sebagai Bacaleg (Wawancara dengan Yati Rohayati melalui WhatsApp, 23 Desember 2022). Tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh PPP, partai berlogo matahari bersinar ini pun mengunjungi segelintir individu yang dipercayai memiliki kapasitas yang besar untuk maju pada kontestasi politik, menurut Iwan saat ditemui di Sekretariat DPD PAN Kota Tangerang, PAN lebih memilih segmen masyarakat yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para mantan birokrat yang berasal dari kerabat para kader PAN itu sendiri, misalnya mantan anggota legislatif, mantan camat, dan sejenisnya. Jika divisualisasikan akan seperti berikut.



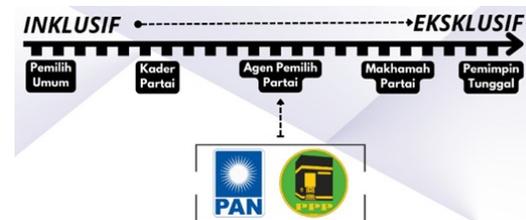
**Gambar 2.** Pihak Yang Dapat Dinominasikan  
Sumber diilustrasikan oleh Penulis 2023

Atas dasar analisis penulis dan divisualisasikan pada gambar di atas, maka pada indikator pertama ini PPP dan PAN menerapkan rekrutmen cenderung eksklusif. Hal ini ditunjukkan dengan diwajibkannya bagi masyarakat untuk menjadi anggota partai politik terlebih dahulu untuk mendaftarkan Bacaleg. Selain itu, kedua partai itu pun melakukan kunjungan terhadap segelintir orang yang dipercaya memiliki potensi untuk memenangkan Pileg. Hal ini pun dilakukan pula oleh partai politik lainnya, misalnya Partai Golkar Kabupaten Tana Toraja, Partai Gerindra Kota Tasikmalaya, dan Partai Perindo Kabupaten Merangin pada Pileg 2019 (Lembang, 2021; Nazaruddin & Warsono, 2021; Yusuf, 2019).

### *Aktor Yang Melakukan Penyeleksian*

Dalam melakukan rekrutmen Bacaleg perempuan, DPC PPP memberikan tanggung jawabnya kepada bidang LP2 dan WPP selaku organisasi sayap perempuan dari PPP. Anggota dari LP2 ini menurut Rahmi (Wawancara dengan Rahmi Rizfa A di Solaria Duta Garden Kota Tangerang, 04 Desember 2023) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota partai lainnya yang ditunjuk oleh Ketua selaku orang yang memiliki jabatan tinggi di kepengurusan partai politik. Saat ditanyakan alasan diikutsertakannya para elite partai dalam rekrutmen Bacaleg, Kholid mengatakan jika PPP sangat berhati-hati dalam memilih Bacaleg, semisal dengan melihat latar belakang Bacaleg (Wawancara dengan Kholid Mansyur di Sekretariat DPC PPP Kota Tangerang, 19 Desember 2022).

Jika PPP memiliki LP2 dan dibantu pula WPP, PAN mempunyai bidang yang serupa, yakni KPPD dan dibantu pula oleh organisasi otonom perempuan yakni PUAN. Untuk komposisi anggota dari KPPD, memiliki kesamaan dengan LP2 yang berada di PPP, menurut Fauzan (Wawancara dengan Fauzan Manafi Albar di Kediaman Fauzan, 10 Desember 2022) dan Rita (Wawancara dengan Rita Satria di Perumahan Permata Pamulang, 29 Desember 2022), bahwa komite ini terdiri dari Ketua DPD yang dibantu oleh Sekretaris DPD serta elite partai lainnya. Dengan demikian, jika diilustrasikan akan seperti di bawah ini.



Gambar 3. Aktor Yang Melakukan Penyeleksian

Sumber diilustrasikan oleh Penulis 2023

Sehingga, kedua partai itu dapat dinilai bersifat cenderung eksklusif, karena pihak yang melakukan rekrutmen terhadap Bacaleg perempuan ialah para elite partai di tingkat daerah. Meskipun yang berperan besar adalah para petinggi partai yang tergabung dalam suatu bidang, yakni LP2 dari PPP dan KPPD dari PAN tetapi ditemukan pula adanya partisipasi dari anggota partai yang dicerminkan hadirnya WPP dan PUAN dalam menyeleksi Bacaleg perempuan. Hal yang serupa pun dilakukan oleh PPP dan PAN di daerah lain, seperti di PPP Kota Semarang (Hadi, 2014), PPP Kabupaten Bekasi (Hasanah,

2016), PAN Kabupaten Sidoarjo (UB & Sukmana, 2015) dan PAN Kota Bekasi (Anshari & Fadiyah, 2019). Bilamana informasi yang penulis peroleh disandingkan dengan informan dari penelitian lain (Anshari & Fadiyah, 2019; Hadi, 2014; Hasanah, 2016; UB & Sukmana, 2015), didapatkan kesamaan hasil temuan mengenai adanya kehati-hatian dalam memilih Bacaleg yang akan mewakili partainya, sehingga para elite partai diikutsertakan sebagai panitia rekrutmen politik.

### *Lokus dan Jenjang Kaderisasi*

Pada PPP, menurut penuturan Kholid saat ditemui di Sekretariat DPC PPP Kota Tangerang (Wawancara dengan Kholid Mansyur, Sekretariat DPC PPP Kota Tangerang, 19 Desember 2022), dirinya mengatakan jika proses rekrutmen berupa penyerahan formulir dilakukan di Sekretariat DPC PPP Kota Tangerang, penyerahan formulir juga dibarengi dengan penyerahan persyaratan yang perlu dipenuhi sesuai dengan PKPU No. 20 Tahun 2018, sementara kepengurusan partai di tingkat kecamatan yaitu PAC dan tingkat kelurahan yaitu Ranting hanya bertugas untuk membantu melakukan sosialisasi dan melakukan pencarian kandidat kepada masyarakat di Kota Tangerang. Hal serupa pun disampaikan oleh Yati seperti berikut.

*“Awalnya kami mengadakan sosialisasi dengan pengurus harian di seluruh tingkatan sampai kelurahan itu. Lalu selanjutnya kita sosialisasi dengan kader-kader PPP juga masyarakat umum. Nah mereka yang ada di*

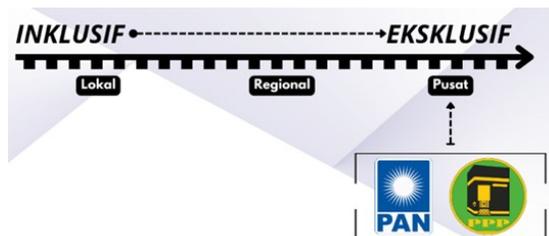
*tingkat kecamatan dan kelurahan biasanya juga bantu mencari kandidat, sebut aja jemput bola dan kita serahkan juga surat undangan untuk menjadi Bacaleg dan datang ke Sekretariat kita. Untuk penyeleksian ya kita lakukan pada tingkat daerah ya, dilakukan secara bersama-sama.”* (Wawancara dengan Yati Rohayati melalui *WhatsApp*, 23 Desember 2022).

Hal serupa pun dilakukan oleh partai yang hadir pada reformasi, yaitu PAN seperti yang disampaikan oleh Iwan berikut.

*“Untuk rekrutmen sendiri kita melibatkan seluruh elemen partai ya, baik KPPD, pihak DPD, anggota partai tingkat kecamatan, serta kelurahan atau ranting. Semua membantu untuk mensosialisasikannya dan mencari kandidat, yang nantinya untuk penyerahan berkas kita itu di Sekretariat DPD PAN Kota Tangerang. Kalo penyeleksian itu kita lakukan di sini juga [Sekretariat DPD PAN Kota Tangerang] yang melibatkan KPPD dan anggota partai tingkat kota aja.”* (Wawancara Iwan Cahyadi di Sekretariat DPD PAN Kota Tangerang, 13 Januari 2023).

Begitupun yang disampaikan oleh Fauzan yang menyampaikan jika rekrutmen Bacaleg memang mengikutsertakan seluruh kepengurusan partai dari tingkat kota hingga kelurahan, yang mana mereka membantu untuk melakukan sosialisasi dan pencarian kandidat untuk dijadikan Bacaleg. Lalu untuk penyerahan persyaratan dan dilanjutkan dengan kaderisasi serta penyeleksian, PAN melakukannya di tingkat pusat yaitu di Sekretariat DPD PAN Kota Tangerang

sebagai kepengurusan tertinggi di tingkat Kab/Kota (Wawancara dengan Fauzan Manafi Albar di Kediaman Fauzan, 10 Desember 2022). Sehingga pada indikator ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4. Lokus dan Jenjang Kaderisasi  
Sumber diilustrasikan oleh Penulis 2023

Berdasarkan gambar itu, dapat disimpulkan jika kedua partai memiliki kesamaan, yaitu sama-sama melakukan rekrutmen dan penyeleksian di kepengurusan partai tingkat pusat, yakni Kabupaten/Kota selaku kepengurusan partai tertinggi di tingkat daerah, yang mengartikan jika kedua partai nyatanya masih bersifat sentralistis. Alasannya, walaupun telah mengikutsertakan kepengurusan partai di tingkat Kecamatan hingga Kelurahan untuk mencari kandidat, namun pada proses penyeleksian hanya mengikutsertakan pihak KPPD yang terdiri dari petinggi partai dan anggota partai di tingkat Kabupaten/Kota saja.

Hal serupa pun ditemui juga pada DPC PPP dan DPD PAN lainnya di Indonesia, misalnya pada DPC PPP Kota Semarang (Hadi, 2014) dan DPC PPP Kabupaten Bekasi (Hasanah, 2016) yang menggunakan pola yang sama dengan DPC PPP Kota Tangerang, dari kedua penelitian itu menghasilkan bahwasanya pihak DPC PPP dalam melakukan rekrutmen memang

dibantu oleh kepengurusan partai di tingkat Kecamatan yaitu PAC dan tingkat Kelurahan yaitu Ranting, namun saat dilakukannya penyeleksian, pihak PPP hanya melakukannya pada kepengurusan partai di tingkat Kabupaten/Kota, dengan alasan untuk mempersingkat waktu dalam penyiapan para kandidat. Sementara PAN pun demikian, semisal pada DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin (Ropik & Wijaya, 2019) dan DPD PAN Kota Medan (Qowi, 2022) yang menghasilkan jika rekrutmen politik memang dibantu oleh pihak kepengurusan tingkat Kecamatan dan Kelurahan, tetapi dalam menjalankan kaderisasi berupa LKAD yang diwajibkan diikuti oleh seluruh Bacaleg dan penyeleksian hanya dilakukan pada tingkat Kabupaten/Kota.

### Proses Pemutusan Kandidat

Dalam proses pemutusan kandidat, kedua Partai Islam nasionalis ini dapat dikatakan bersifat eksklusif. Alasannya, meskipun para pengurus partai mengatakan jika mereka menggunakan model pemilihan dengan metode *scoring*, namun pada realitanya semua keputusan dikembalikan lagi kepada para elite partai karena telah menyiapkan nomor urut strategis yang ditunjukkan bagi segelintir individu atas dasar beberapa hal, misalnya di PPP seperti yang diungkapkan Rahmi berikut.

*“Untuk penentuan nomor urut sendiri, setau saya dilihat kelayakannya. Terus juga untuk nomor urut 1 sampai 3 itu ya biasanya incumbent dan udah lumutan [anggota lama] di*

PPP. Terus misalkan ada faktor eksternal ya dilihat ada potensi apa sih yang dibawa. Dan itu semua yang ngurus sih yang atas [elite partai] ya." (Wawancara dengan Rahmi Rizfa A di Solaria Duta Garden Kota Tangerang, 04 Desember 2023)

Dari ucapannya, dibuktikan bahwa tokoh *incumbent* dan lamanya seorang kader di partai dapat mempengaruhi pemberian nomor urut. Alur yang serupa pun dilakukan oleh DPD PAN Kota Tangerang, meskipun menurut pemaparan Iwan penentuan nomor urut hanya didasarkan atas hasil metode *scoring* (Wawancara dengan Iwan Cahyadi di Sekretariat DPD PAN Kota Tangerang, 13 Januari 2023). Tetapi, pernyataan tersebut bertentangan dengan keterangan Rita yang menegaskan jika penentuan nomor urut pada partai tersebut telah direncanakan oleh elite partai, bahkan dirinya yang menduduki nomor urut 3 dikarenakan adanya kedekatan dengan petinggi partai dari partai yang muncul pada era reformasi ini, seperti berikut.

"Ada yang udah ditentukan [kandidat Caleg] dari pusat. Jadi DPD yang cari kandidatnya, nanti semua pemutusan balik lagi di pusat. Semua parpol kaya gitu, ga cuman PAN aja, semua itu permainan. Terus juga kalo kamu mau tau, nomor urut 1, 2, dan 3 itu udah pasti titipan. Kaya ibu aja, ibu kan jatuhnya dibeli gitu ya dari partai lain, terus juga ibu dekat sama Ketua PAN dulu, Pak Ali Taher, Ibu langsung ditempatkan di nomor urut 3." (Wawancara dengan Rita Satria di Perumahan Permata Pamulang, 29 Desember 2022).

Dari ucapannya, didapati informasi bahwa DPD PAN nyatanya menggunakan model penunjukan yang dicerminkan adanya campur tangan elite partai di tingkat pusat dalam proses pemutusan kandidat ini. Tak hanya demikian, beliau pun sangat berani untuk memberikan keterangan bahwa nomor urut strategis seperti 1 hingga 3 telah "disimpan" bagi kader-kader tertentu atas rekomendasi dari para elite partai, baik di tingkat wilayah bahkan pusat, sehingga didapati bahwasanya nomor urut menjadi suatu hal yang sangat penting bagi Bacaleg manakala Pileg dilakukan.

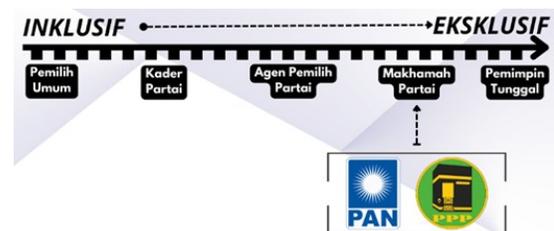
Pemberian nomor urut kepala seperti 1 hingga 3 bagi para politisi yang memiliki pengaruh besar di partai politik nyatanya bukan suatu fenomena yang lumrah. Alasannya beberapa hasil penelitian menunjukkan jika nomor urut 1, 2, dan 3 merupakan nomor urut yang telah disiapkan bagi mereka yang memiliki jabatan tinggi di partai, misalnya Ketua dan Wakil Ketua (Mayrudin et al., 2022; Setiawan, 2015), sosok petahana dan pihak yang digadang-gadang akan menjadi elite partai di masa yang akan datang (Kirono, 2019), politisi yang mempunyai modal sosial, lamanya menjabat di partai, dan memberikan sumbangsih besar bagi partai politik (Sulastri et al., 2020), serta adanya ikatan kekerabatan antara Bacaleg dengan petinggi partai (Purwaningsih, 2022). Jika berkaca pada DCT Anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2019 (KPU Kota Tangerang, 2018), alasan para Caleg PPP menduduki nomor urut kepala karena mereka merupakan tokoh yang memiliki

pengaruh dari masing-masing partai politik. Pada PPP misalnya, Yati yang menduduki nomor urut 1 dikarenakan dirinya merupakan tokoh *incumbent* dan beliau pun menjabat sebagai Ketua partai pada kala itu dan Rita memperoleh nomor urut 3 karena dirinya merupakan Bacaleg yang “dibeli” dari partai lain, bahkan dirinya juga memiliki kedekatan dengan elite partai di PAN. Dengan demikian, tidak mengherankan jika para Caleg tersebut dapat menduduki nomor urut strategis pada Pileg tahun 2019 silam.

Beberapa tulisan menyimpulkan bahwa nomor urut strategis, seperti nomor urut 1 dan 2 dianggap mampu memberikan peluang besar terpilihnya Caleg dalam Pemilu (Ahmadi, 2019; Jovani, 2015; Ramadhany & Rahmawati, 2020; Umagapi, 2020). Hal ini pun dibuktikan dengan hasil Pileg 2014 dan 2019 di Kota Tangerang lalu, yang menunjukkan jika para Caleg yang lolos menjadi pemenang dalam kontestasi politik itu sebagian besar memiliki nomor urut antara 1 dan 2 (KPU Kota Tangerang, 2014, 2019). Terkait nomor urut, Rita selaku Caleg PAN sempat menyinggung hal ini seperti berikut.

*“Banyak yang bilang nomor urut itu ga masalah, tapi dilihat dulu yang terpilih punya pengaruh besar ga? Terus juga orang tua pasti milihnya yang ga jauh dari logo partai, ya nomor satu. Nyatanya juga kemarin yang ibu lihat, nomor paling terakhir cuman dapet 16 suara doang, masih mau bilang nomor urut ga ngaruh?”* (Wawancara dengan Rita Satria di Perumahan Permata Pamulang, 29 Desember 2022).

Berdasarkan hasil penelitian (Ahmadi, 2019; Jovani, 2015; Ramadhany & Rahmawati, 2020; Umagapi, 2020) dan didukung oleh DCT dan hasil Pileg tahun 2014 dan 2019 di Kota Tangerang (KPU Kota Tangerang, 2014, 2019), serta penuturan Rita, dapat disimpulkan bahwa walaupun pada saat ini banyak Caleg yang berhasil duduk di kursi parlemen yang berasal dari nomor urut 4 hingga ke bawah, tetapi nomor urut 1 hingga 3 pada realitanya memang masih memiliki pengaruh yang besar untuk memenangkan kontestasi politik. Pada tahapan pemutusan kandidat yang dijalankan oleh kedua Partai Islam nasionalis ini bersifat eksklusif. Karena dari hasil wawancara dan analisis penulis, pemutusan kandidat didasarkan atas rekomendasi para elite partai. Dengan demikian jika hasil analisis divisualisasikan, maka akan seperti berikut.



Gambar 5. Proses Pemutusan Kandidat  
Sumber diilustrasikan oleh Penulis 2023

#### IV.KESIMPULAN

Berlandaskan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan menggunakan teori pengorganisasian partai politik milik Hazan dan Rahat dalam (Katz & Crotty, 2006) dapat disimpulkan jika PPP dan PAN menggunakan pola rekrutmen politik yang cenderung mengarah ke eksklusif yang dicerminkan semisal proses perekrutan

ditunjukkan bagi masyarakat luas dan segelintir orang yang memiliki potensi yang besar untuk memenangkan Pileg, lalu diikutsertakannya petinggi partai politik dalam perekrutan hingga proses penetapan Caleg dengan nomor urut yang akan mereka bawa pada saat kontestasi politik di tahun 2019 lalu. Sehingga jika dikaitkan dengan pendapat (Pamungkas, 2011) didapati bahwasanya lokus kekuasaan kedua Partai Islam nasionalis itu masih bersifat terpusat pada pemimpin atau elite partai yang ditandai masih terlibatnya kepengurusan partai pusat untuk memutuskan suatu urusan pada partai politik di tingkat daerah. Tidak hanya demikian, penulis menilai jika proses rekrutmen Bacaleg perempuan yang digerakkan oleh kedua Partai Islam nasionalis ini telah sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang dicerminkan dengan dilaksanakannya rekrutmen politik secara terbuka bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki dan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R. (2017). FEMINISME DAN KETAHANAN BUDAYA PEREMPUAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI ISLAM WANITA (Studi pada Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah Periode 2012-2016). *JURNAL POLINTER: KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 2(2), 54-78.
- Agustyati, K. N. (2020). Arah Kebijakan Afirmasi Perempuan Dalam R UU Pemilu Representasi Deskriptif Vs Representasi Substantif. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(3), 75-88.
- Ahmadi, Y. (2019). *Pandangan masyarakat pada Calon Anggota Legislatif (Caleg) perempuan PPP di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Gresik*. Universitas Negeri Sunan Ampel.
- Amanda, G. (2022). *PPP: Perempuan Punya Peran Besar untuk Bangsa*. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/r34fp3423/ppp-perempuan-punya-peran-besar-untuk-bangsa>
- Andari, P. T. P., & Adnan, M. (2018). Pola Rekrutmen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Penentuan Caleg Perempuan pada Pileg 2014 di Kabupaten Grobogan. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 61-70.
- Anshari, I., & Fadiyah, D. (2019). Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus: Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kota Bekasi Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif DPR RI Tahun 2014-2019). *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 4(2), 18-35.
- Arka, I. K. (2021). Pengaruh Affirmative Action Terhadap Elektabilitas Calon Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kota Denpasar. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 749-762.
- Aufar, A. F., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2022). Upaya Penanganan Permasalahan Perempuan Dalam Program Corporate Sosial Responsibility (CSR). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 6(1), 1-11.
- Baidoi, A. (2008). *PPP Akan Maksimalkan Peran Perempuan*. News.Okezone.Com. <https://news.okezone.com/read/2008/04/21/1/102339/ppp-akan-maksimalkan-peran-perempuan>
- Ballington, J., & Matland, R. E. (2004). Political Parties and Special Measures: Enhancing Women's Participation in Electoral Processes. *Expert Group Meeting on "Enhancing Women's Participation in Electoral Processes in Post-Conflict Countries"*. [https://www.legislationline.org/download/action/download/id/2890/file/Political Parties and Special Measures Enhancing Women's.pdf](https://www.legislationline.org/download/action/download/id/2890/file/Political%20Parties%20and%20Special%20Measures%20Enhancing%20Women's.pdf)
- BPS Kota Tangerang. (2017). *KOTA TANGERANG DALAM ANGKA 2017*. BPS Kota Tangerang.

- BPS Kota Tangerang. (2022). *Kecamatan Tangerang Dalam Angka 2022*.
- DPC PPP Kota Tangerang. (2023). *Susunan Ketua-Sekretaris Sepanjang Periode*.
- Ekawati, E. (2015). Penerapan Kebijakan Afiriasi dan Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilu 2009. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 1(1), 61–83.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Ketiga bel). INSIST Press.
- Firmansyah, J., & Faradhila, S. (2022). MODAL POLITIK KANDIDAT PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM Studi Kasus Dewi Noviany dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. *Jurnal Trias Politika*, 6(1), 88–103.
- Fransiska. (2003). *PAN Targetkan 38 Persen Keterwakilan Perempuan di Legislatif*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/20813/pantargetkan-38-persen-keterwakilan-perempuan-di-legislatif/full&view=ok>
- Hadi, M. R. A. (2014). Analisis Proses Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Kota Semarang (Studi Kasus Pada Partai Persatuan Pembangunan). *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 146–155.
- Halim, D. (2019). *Buka-bukaan Caleg soal Penentuan Nomor Urut di Partainya*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/01/08412811/buka-bukaan-caleg-soal-penentuan-nomor-urut-di-partainya?page=all%0A>
- Hasanah, N. (2016). *Pandangan Dan Strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mengenai Calon Legislatif Perempuan Kabupaten Bekasi Periode 2009-2014*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Himawan, C. J., Utomo, S., & Astuti, P. (2015). Analisis Kemenangan H. Supriyadi, s. sos Terpilih Yang Kedua Kalinya Sebagai Calon Anggota Dprd Kota Semarang 2014–2019 Dilihat Dari Prespective Politik. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(1), 61–70.
- Ikmal, M. (2019). Afiriasi Partai Politik Meningkatkan Partisipasi Perempuan: Sebuah Studi di Kabupaten Sumenep. *Angewandte Chemie International Edition*, 5(2), 306–321.
- Indriyani, I. A., Hikmawan, M. D., & Godjali, M. R. (2020). Gender Mainstreaming Through Woman Political Participation at Representative Council in Banten Province. *SHS Web of Conferences*, 86, 01044. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20208601044>
- Jovani, A. (2015). Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia di Era Digital. *Jurnal Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika Dan Demokratis*, 1(1), 301–322.
- Kambuaya, C. (2015). Pengaruh motivasi, minat, kedisiplinan dan adaptasi diri terhadap prestasi belajar siswa peserta program afiriasi pendidikan menengah asal papua dan papua barat di kota bandung. *SHARE: Social Work Journal*, 5(2).
- Katz, R. S., & Crotty, W. (2006). *Hanbook of Party Politics*. Sage Publications Ltd.
- Kirono, I. P. (2019). *Kontestasi Antar Organisasi Sayap Dan Hastakarya Partai Golkar Dalam Posisi Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur 2019*. Universitas Airlangga.
- Kiswondari. (2022). *Politikus PAN Dorong Perempuan Tempati Posisi Strategis di Ruang Publik*. Nasional.Sindonews.Com. <https://nasional.sindonews.com/read/743499/12/politikus-pan-dorong-perempuan-tempati-posisi-strategis-di-ruang-publik-1649945058>
- Komisi Pemilihan Umum. (2018). *Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*. Komisi Pemilihan Umum. BN.2018/No.834, [jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)
- Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. (2013).

- Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan 1-5.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. (2014). *Data Hasil Pemilu 2014 Caleg DPRD Kota Tangerang*.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. (2018). *Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan 1-5*.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. (2019a). *Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Dalam Pemilu Tahun 2019*. <https://kota-tangerang.kpu.go.id/pengumuman-daftar-calon-tetap-dct-anggota-dprd-kota-tangerang-dalam-pemilihan-umum-tahun-2019/>
- Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. (2019b). *Data Hasil Pemilu 2019 Caleg DPRD Kota Tangerang*.
- Kumari, F. (2016). Agama dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Analisis Gender dan Filsafat Taoisme Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 10(2), 153–165.
- Labolo, M. (2015). *Partai Politik dan Sistem pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. PT RajaGrafindo Persada.
- Lembang, E. (2021). *Kekuatan Politik Partai Golkar Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kabupaten Tana Toraja*. Universitas Hasanuddin.
- Mafatihul, U. (2015). Kegagalan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2009. *Jom FISIP*, 2(1), 1–11.
- Mansur, A., & Hermawan, B. (2018). *Ketum PAN Minta Kader PUAN Berperan Aktif di Tahun Politik*. Republika.Co.Id.
- Mayrudin, Y. M., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-partai Politik. *Ijd-Demos*, 4(3), 1071–1090.
- Natasyah, O. C. (2019). *Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pelaksanaan Undang-Undang Partai Politik (Studi Kasus DPD Partai GOLKAR Kota Surabaya 2014-2019)*. Universitas Airlangga.
- Nazaruddin, & Warsono. (2021). Strategi Politik Partai Perindo Dalam Mendulang Suara Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 3(1).
- Pemerintah Pusat. (2008). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Pusat. (2011). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Pusat. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Peraturan Pemerintah.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106–116.
- Purwaningsih, T. (2022). Politik Kekerasan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, 1(1), 4.
- Raharja, R. M. (2019). *RESPON PARTAI DALAM PEMENUHAN KUOTA PEREMPUAN PADA PENCALONAN LEGISLATIF 2019: STUDI KASUS: PDIP KOTA SEMARANG*. Universitas Diponegoro.
- Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 39–62. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7237>
- Rochim, A. (2019). *Gelar Rakornas, PPP Ingin Perkuat Peran Perempuan Nasional*. Sindonews.Com. <https://nasional.sindonews.com/berita/1468396/12/gelar-rakornas-ppp-ingin-perkuat-peran-perempuan>

- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal, 7(1)*, 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Sari, N. (2020). Affirmative Action Di Aceh: Kendala Dan Upaya Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan. *Open Journal Systems, 1(1)*. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JPS/article/view/19159>
- Setiawan, A. (2015). Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Pontianak. *Jurnal Aspirasi, 3(2)*, 1–14.
- Silalahi, M., Marpaung, P., Panjaitan, D. T. M. R., & Da'oo, B. (2019). Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Politik Perindo pada Pemilihan Umum 2019 di Sumatera Utara. *Jurnal Governance Opinion, 4(1)*, 130–149.
- Sofian, S., & Nahdiah, A. (2022). KENDALA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN REPRESENTASI 30 PERSEN PEREMPUAN DI PARLEMEN. *Jurnal Keadilan, 2(2)*.
- Sukriono, D. (2018). Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3(1)*, 37–46.
- Sulastri, E., Purnomo, E. P., Setiawan, A., Fathani, A. T., & Oktawan, C. (2020). Pertarungan Perempuan Dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional, 26(3)*, 308–332.
- Sutrisno, S. (2016). Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014. *Jurnal As-Salam, 1(2)*, 105–117.
- Sweinstani, M. K. (2019). Partai Islam, Tafsir Agama, dan Representasi Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan. *Politika: Jurnal Ilmu Politik, 10(2)*, 179–198.
- UB, A. R., & Sukmana, H. (2015). Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik), 3(2)*, 179–198.
- Umagapi, J. L. (2020). REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019 TANTANGAN DAN PELUANG. *Kajian, 25(1)*, 19–34.
- Wulandari, A. (2020). Menghadirkan Perempuan dalam Historiografi Pasca Merdeka: Membangun Karakter Bela Negara Melalui Narasi Sejarah. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara, 10(2)*, 133–150.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Application: Design and Methods, In Case Study Research and Application "Design and Methods (Sixth Edit)*.
- Yusuf, A. H. (2019). *Pola Rekrutmen Partai Gerindra Studi Kasus Dalam Penetapan Caleg DPRD Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kota Tasikmalaya*. Universitas Siliwangi.
-